

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang teridentifikasi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) entitas *stakeholder* dengan 4 (empat) kategori yaitu Institusi Pemerintah, Institusi Swasta, Institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) serta Institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat yang melakukan 4 (empat) pola Pengelolaan Berbasis Rehabilitasi DAS, Berbasis Project NGO/LSM, Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kombinasi *Stakeholder*.
2. Sumber Daya Hutan Lindung Gambut Londerang memiliki 2 (dua) pemangku wilayah yaitu KPHP Unit XIII Muaro Jambi dan KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur yang membuat perencanaan dan implementasi pengelolaan mengacu pada 2 (dua) Visi, Misi, Kebijakan dan Kegiatan tingkat tapak yang berbeda, terlebih lagi 2 (dua) pemangku wilayah tersebut belum memiliki struktur yang menangani HLG Londerang secara khusus serta pemenuhan Sumber Daya Manusia dan Finansial belum memadai.
3. Rumusan Strategi Pengelolaan *Stakeholder* Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang berfokus pada *Strategic Planning* dengan memperhatikan aspek *Strengths* dan *Opportunities* serta menerapkan *Human Development Strategy* dengan memperhatikan aspek *Aspiration* dan *Results* salah satunya dengan Membentuk Struktural Kelembagaan khusus yang menangani HLG Londerang dengan dukungan pemenuhan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Finansial yang memadai dibawah KPHP unit XIII dan KPHP unit XIV agar saling terintegrasi dan mengakomodir banyaknya *stakeholder* pengelolaan di HLG Londerang.

5.2. SARAN

1. Untuk pencapaian pengelolaan HLG Londerang saat ini, Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan berkala terhadap pengaturan peran serta 33 (tiga puluh tiga) entitas *stakeholder* terutama difokuskan pada setiap kategori stakeholder dengan masing-masing pola implementasi agar capaian implementasi pengelolaan dapat lebih terukur dan terarah.

2. Terhadap terdapat lebih dari 1 (satu) unit pengelola Tingkat tapak pada HLG Londerang dan untuk mengefektifkan koordinasi serta kinerja kelembagaan perlu dibentuk struktur yang melakukan pengelolaan HLG Londerang secara khusus dibawah masing-masing Pemangku Wilayah (KPH) dengan dukungan pemenuhan sumber daya manusia dan finansial yang memadai agar terciptanya Pengelolaan HLG Londerang yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
3. Diperlukan kajian kelembagaan untuk membentuk 1 (satu) unit manajemen khusus yang melakukan pengelolaan terhadap HLG Londerang, minimal dalam bentuk Kelompok Kerja (POKJA) HLG Londerang dengan *Job Description* berfokus pada meningkatkan Kinerja Kelembagaan dalam Upaya Peningkatan Kinerja HLG Londerang sebagai sebuah Fungsi Hutan Lindung Gambut yang ideal dan berkelanjutan.